

**DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN
PERMUKIMAN KUMUH**

**(Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi,
Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Rossany Maulida Diandra

NIT. 21303902

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

ABSTRACT

Population growth without an even distribution of population will be a problem in the development of a city, one of which is the emergence of slums. The existence of slums has an impact on the quality of life of the community. One of the slum arrangements in Indonesia is done by improving the quality of slums through rejuvenation. Rejuvenation focuses on the transformation of the area as a whole, both in terms of physical, economic, social, and land legality. The purpose of this study is to determine the economic and social impacts arising from the implementation of the rejuvenation program for the community in Kampung Harmoni Semanggi. The method used in this research is qualitative method with descriptive analysis approach. The results show that the implementation of slum rejuvenation in Kampung Harmoni Semanggi is in accordance with Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018, namely pre-construction, construction, and post-construction, with financing from CSR, APBD, and community self-help. Stakeholders consist of the government, private institutions, and the community; each plays a role in policy, funding, implementation, and supervision. Economically, there have been changes in income, employment, and asset ownership that are now more legal and permanent. Socially, community interaction has increased through various community activities and waste management has become more orderly and environmentally friendly.

Keywords: Slum Upgrading, Economic Impact, Social Impact, Rejuvenation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	14
C. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Format Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Definisi Operasional	26
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	35
A. Kondisi Geografis	35
B. Kondisi Ekonomi dan Sosial	36
BAB V PELAKSANAAN PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG HARMONI SEMANGGI	38
A. Kondisi Kampung Harmoni Semanggi Sebelum Pelaksanaan Peremajaan	38

B. Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh Kampung Harmoni Semanggi	47
C. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh Kampung Harmoni Semanggi.....	56
BAB VI PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG HARMONI SEMANGGI	59
A. Instansi Pemerintah	59
B. Lembaga Swasta.....	62
C. Masyarakat	63
BAB VII DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	65
A. Dampak Ekonomi.....	65
B. Dampak Sosial.....	71
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan global (Allen et al., 2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi bumi (Mori Junior et al., 2019). Dari 17 tujuan yang ada, salah satu tujuannya adalah kota dan permukiman berkelanjutan. Tujuan ini meliputi jumlah hunian layak dan terjangkau; dan proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua; serta mewujudkan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, perkembangan suatu kota tidak dapat dipisahkan dari dinamika pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Perkembangan suatu kota tidak luput dari pertumbuhan penduduk (Nursyahbani & Pigawati, 2015). Pertumbuhan penduduk yang tidak didampingi dengan penyebaran penduduk yang merata akan menjadi masalah dalam perkembangan suatu kota. Indonesia memiliki 281,6 juta jiwa penduduk (BPS, 2024) menjadikannya negara ke empat dengan penduduk terbanyak di dunia. Tidak berhasilnya perkembangan suatu perkotaan sangat berkaitan dengan tingginya tingkat urbanisasi, terbatasnya ketersediaan lahan, dan belum adanya program pemerintah yang tepat (Anisyaturrobiah, 2021). Masalah-masalah tersebut dapat memicu munculnya permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah bentuk hunian yang tidak berstruktur, memiliki kualitas yang buruk, jalan-jalannya tidak teratur, dan tidak tersedia fasilitas umum (Yurmansah & Mussadun, 2016). Adanya permukiman kumuh berdampak pada kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur maupun perbaikan sanitasi. Menurut Wijaya (2016), permukiman kumuh memiliki beberapa kriteria, antara lain lingkungannya kurang terlayani infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan, drainase, saluran limbah, dan lain-lain; selanjutnya adalah hunian

di kawasan tersebut kurang layak huni ditandai dengan kurangnya ventilasi maupun pencahayaan. Kota metropolitan di Indonesia memiliki permasalahan yang sama yaitu sulit untuk menyediakan ruang hidup dan tempat tinggal khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Febriana et al., 2022). Masalah ini terjadi sehubungan dengan predikat multifungsi yang disandang kota besar tersebut yaitu sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan masih banyak lagi.

Penataan permukiman kumuh di Indonesia dilakukan dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Fakhri et al., 2022). Salah satu kegiatan dalam program KOTAKU ini adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh terdapat 3 cara pola penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Pola penanganan tersebut antara lain Pemugaran, Peremajaan, dan Permukiman Kembali. Tujuan peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Mutu kehidupan dan penghidupan berkelanjutan masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi ekonomi dan sosial dapat mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Kaiser et al., 2025). Menurut Yuniar, dkk (2021) pilar keberlanjutan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat menjadi dasar penting dalam menilai keberhasilan program pembangunan, terutama dalam konteks penataan permukiman kumuh.

Program KOTAKU sendiri sudah dilaksanakan di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Kota Surakarta. Misi pemberantasan

permukiman kumuh telah menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Surakarta. Misi ini telah dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif adalah salah satu isu mengenai permukiman kumuh. Perwujudan ini dilakukan salah satunya dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui peremajaan.

Menurut Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Pasal 1 yang dimaksud Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman. Menurut (Dharma, 2018) peremajaan adalah pembongkaran sebagian atau seluruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah negara dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang. Peremajaan memiliki fokus pada transformasi kawasan secara menyeluruh, baik dari sisi fisik, ekonomi, sosial, maupun legalitas lahan. Kebijakan peremajaan permukiman kumuh bertujuan agar seluruh keluarga dan anggota masyarakat yang menghuni permukiman kumuh dapat menghuni rumah yang layak dan teratur dengan status pemilik tanah serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Alfarisi et al., 2023).

Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan program KOTAKU melalui Peremajaan di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 653/96 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta, Kelurahan Semanggi merupakan kelurahan yang memiliki permukiman kumuh terluas di Kota Surakarta. Permukiman kumuh ini memiliki luas 76,03 ha. Kelurahan Semanggi merupakan salah satu kelurahan yang berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo.

Menurut Hartanto (2023), kawasan hunian hasil peremajaan di Semanggi, dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum (fasum) antara lain pedestrian, lampu penerangan jalan, drainase, area berkumpul dan bermain anak, hingga rumah baca yang desainnya menyerupai kapal besar. Namun dalam artikelnya

Arianto (2023), menyebutkan belum ada perubahan signifikan selain perubahan fisik dan lingkungan di Kelurahan Semanggi yang terjadi pasca peremajaan. Belum adanya perubahan ini terlihat dari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Setelah dilakukan peremajaan mayoritas warga masih memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal itu terlihat pada kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti buruh, tukang becak dengan penghasilan tidak tetap dan dibawah upah minimum. Selain itu, salah satu infrastruktur yang dibangun dengan tujuan untuk ruang diskusi dan interaksi sosial masyarakat yaitu perpustakaan, belum difungsikan dengan maksimal oleh masyarakat. Selaras dengan pernyataan Lestari (2023), Ketua RT setempat mengatakan telah dibangun fasilitas umum berupa perpustakaan di Kampung Semanggi Harmoni. Malangnya, sarana publik ini sampai sekarang belum terisi buku dan tidak ada petugas yang menjaga perpustakaan. Hal itu mengakibatkan beberapa fasilitas seperti tali bermain mulai rusak.

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan "*Dampak Ekonomi Dan Sosial Pasca Peremajaan Permukiman Kumuh (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta)*". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat dilaksanakannya program peremajaan bagi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi dan sosial dikarenakan kedua kondisi tersebut yang belum terlihat perubahannya, berbeda dengan kondisi fisik dan lingkungan masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi wilayah lain yang memiliki kondisi serupa dan akan mengadaptasi program peremajaan, agar dampak ekonomi dan sosial yang timbul dapat diantisipasi.

B. Perumusan Masalah

Tingginya tingkat urbanisasi masyarakat di Kota Surakarta sebesar 76,8% membuat kepadatan penduduk menjadi tinggi (Aziz dkk., 2023). Makin terbatasnya ketersediaan lahan dan juga kurang terjangkaunya harga perumahan yang ada mengakibatkan banyak permukiman kumuh yang muncul

di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program KOTAKU dengan Peremajaan sebagai solusi permukiman kumuh di Kelurahan Semanggi. Program ini meliputi pembangunan rumah layak huni lengkap dengan infrastrukturnya seperti saluran drainase, rumah pompa, pompa banjir, ruang terbuka hijau (RTH), perpustakaan dan penataan jalan.

Meskipun pembangunan telah selesai dilaksanakan, belum terjadi perubahan yang berarti dari kualitas hidup masyarakat. Belum adanya perubahan ini terlihat dari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Setelah dilakukan peremajaan mayoritas warga masih bekerja di sektor informal seperti buruh, tukang becak dengan penghasilan tidak tetap dan dibawah upah minimum. Selain itu, salah satu infrastruktur yang dibangun dengan tujuan untuk ruang diskusi dan interaksi sosial masyarakat yaitu perpustakaan, belum difungsikan dengan maksimal oleh masyarakat. Perpustakaan belum memiliki petugas yang menjaga setiap hari menjadikan akses ke perpustakaan tersebut masih sulit.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, kajian dalam penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi dan dampak sosial dari kegiatan peremajaan permukiman kumuh di Kampung Harmoni Semanggi. Untuk mengetahui mengenai dampak ekonomi dan dampak sosial yang terjadi maka dilakukan kajian terhadap kegiatan peremajaan permukiman kumuh di Kampung Harmoni Semanggi, mulai dari Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi, dan Tahap Pasca Konstruksi serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan. Untuk membantu dalam memperjelas permasalahan atau kondisi yang akan diteliti, maka disusunlah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kegiatan Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta?
2. Siapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan apa perannya?

3. Apa dampak ekonomi dan dampak sosial yang dialami masyarakat pasca Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui proses Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta
- b. Mengetahui pemangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam kegiatan Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta
- c. Mengetahui dampak ekonomi dan dampak sosial yang timbul pasca Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberi kegunaan antara lain:

- a. Akademik, penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai Peremajaan Permukiman Kumuh serta dampak ekonomi dan sosialnya kepada penulis maupun pembaca.
- b. Praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh di Kelurahan Semanggi dan rujukan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Surakarta pada khususnya, dan Pemerintah Daerah pada umumnya, juga sebagai rekomendasi dan masukan untuk pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh berikutnya.
- c. Umum, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai program peremajaan permukiman kumuh dan dampak ekonomi dan dampak

sosial yang terjadi pada masyarakat, serta sebagai bahan masukan jika program peremajaan ini dilakukan di wilayah lain.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dampak ekonomi dan sosial pasca peremajaan permukiman kumuh yang dilaksanakan di Kampung Harmoni Semanggi, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh

Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Harmoni Semanggi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018. Tahapan tersebut antara lain Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi, dan Tahap Pasca Konstruksi. Pembiayaan proses peremajaan ini melalui dana CSR, APBD maupun swadaya masyarakat.

2. Pemangku Kepentingan

Terdapat tiga klasifikasi Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh di Kampung Harmoni Semanggi. Pemangku kepentingan tersebut antara lain Pemerintah, Lembaga Swasta dan Masyarakat. Instansi pemerintah memiliki peran dalam pembuatan kebijakan pelaksanaan peremajaan serta bertanggung jawab dalam pendanaan dan pengawasan program. Lembaga swasta berkontribusi melalui pembiayaan dan kerjasama, dan masyarakat berperan sebagai penerima program, berpartisipasi pada program dan ikut melakukan pengawasan keberlanjutan program peremajaan.

3. Dampak Ekonomi dan Sosial

a. Kondisi ekonomi masyarakat mengalami beberapa perubahan setelah dilaksanakan program peremajaan permukiman kumuh. Kondisi ekonomi berdasarkan pendapatan masyarakat menjadi lebih berat, karena penghasilan tetap namun pengeluaran masyarakat meningkat untuk kebutuhan air dan listrik serta iuran setelah peremajaan. Sebagian WTP tidak mengalami perubahan mata pencaharian, dikarenakan lokasi pekerjaan jauh dari lokasi

peremajaan. Perubahan mata pencaharian beberapa WTP terjadi dari tukang rosok menjadi penjual angkringan, dengan memanfaatkan hunian dan akses yang didapat setelah peremajaan. Kepemilikan asset masyarakat berupa tanah dan bangunan yang dimiliki seluruhnya sudah berupa menjadi permanen dan berdiri diatas tanah yang legal.

- b. Kondisi Sosial masyarakat mengalami perubahan pasca dilaksanakan peremajaan permukiman kumuh. Perubahan tersebut terlihat dari interaksi sosial dan pengelolaan sampah oleh masyarakat. Interaksi sosial masyarakat setelah peremajaan permukiman kumuh bertambah, seperti Pertemuan KSM, Kumpul Dawis, dan senam. Pengelolaan sampah oleh masyarakat semakin baik ditandai dengan tidak ada lagi masyarakat yang membakar dan membuang sampah ke sungai setelah peremajaan permukiman kumuh dilaksanakan.

B. Saran

Untuk memaksimalkan perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setelah program peremajaan permukiman kumuh menjadi lebih baik, perlu dilakukan:

1. Instansi Pemerintah dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk masyarakat agar kualitas hidup masyarakat mengalami peningkatan secara berkelanjutan.
2. Pemangku kepentingan pelaksana Peremajaan permukiman kumuh Kampung Harmoni Semanggi dapat meningkatkan koordinasi secara berkala agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam komunikasi saat pelaksanaan program.
3. Instansi Pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai penyampaian atau pelaporan permasalahan yang terjadi setelah program peremajaan dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Aberta, M., Nugroho, T., Amrullah, M. N. K., & Suharto, E. (2024). Konsolidasi Tanah Kasultanan dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta. *Jurnal Pertanahan*, 14, 109–130.
- A.Hidayah, N., Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2019). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Alam Dan Sejarah Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2179>
- Alfarisi, S., Sabrina, T., & Rujiman, D. (2023). Analisis Peremajaan Kawasan Kumuh Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 165–173. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14654>
- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. *Sustainability Science*, 13(5), 1453–1467. <https://doi.org/10.1007/S11625-018-0572-3/FIGURES/4>
- Anatan, L. (2010). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 8(2), 66–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jmm.v8i2.192>
- Anisyaturrobiah, A. (2021). Dampak Urbanisasi Terhadap Penyediaan Pemukiman Dan Perumahan Di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBAKU)*, 1, 43–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.136>
- Arfiani, W. R. (2015). *Hubungan Perubahan Rumah Dan Lingkungan Permukiman Dengan Kondisi Sosial Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat*. <https://doi.org/perpustakaan.uns.ac.id>
- Arianto, A. D. (2023, November 9). Pembangunan Kampung Semanggi Harmoni Tak Berkelanjutan, Banyak Fasilitas Mulai Rusak. *Solotrust.Com*.
- Asianto, Q. H. (2021). *Imobilitas Penduduk Kawasan Kumuh Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon*.
- Ayuning, O., & Mardiansjah, F. H. (2022). Pemangku kepentingan dalam pengembangan Kota Lama Semarang berdasarkan peran dan tingkat kepentingan. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 500. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.42358>
- Aziz, S., Rahayu, P., & Istanabi, T. (2023). Potensi Wilayah Perkotaan Polisentris Pada Surakarta Raya Ditinjau Dari Perspektif Pusat Aktivitas. *Jurnal Pengembangan Kota*, 11(2), 140–154. <https://doi.org/10.14710/jpk.11.2.140-154>
- Cahyawati, M. S. B. (2024). *Analisis Kualitas Tempat Tinggal dan Penataan Permukiman Masyarakat di Kampung Semanggi Harmoni Kelurahan*

- Semanggi Kota Surakarta Tahun 2024.*
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/122308/Analisis-Kualitas-Tempat-Tinggal-dan-Penataan-Permukiman-Masyarakat-di-Kampung-Semanggi-Harmoni-Kelurahan-Semanggi-Kota-Surakarta-Tahun-2024>
- Cay, T., & Satilmis, R. Y. (2024). Economic analysis of land consolidation project: Kızılcabölük neighborhood, Tavas-Denizli-Turkey Province. *International Journal of Engineering and Geosciences*, 9(3), 334–344. <https://doi.org/10.26833/ijeg.1429522>
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1991). Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for 21st Century. *IDS DISCUSSION PAPER*.
- Dharma, A. (2018). *Peremajaan Permukiman Kumuh Di Dki Jakarta.* <https://doi.org/https://api.core.ac.uk/oai/oai:repository.gunadarma.ac.id:605>
- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. (2025). *ASPEK PEMBERDAYAAN Prinsip Membangun Kesadaran & Kepedulian Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).* <https://epkp.ciptakarya.pu.go.id/Pemberdayaan>.
- Fakhri, H., Astuti, W., & Andini, I. (2022). Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan HP 00001 Kelurahan Mojo dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Desa-Kota Jurnal perencanaan Wilayah, Kota dan Permukiman*, 1, 64–76. <http://jurnal.uns.ac.id/jdk>
- Febriana, A., Siddiq, N. K., & Sakti, L. (2022). Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak). *Jurnal Fundamental Justice*, 165–179. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i2.2414>
- Fitria, N., & Setiawan, R. P. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *JURNAL TEKNIK POMITS*, 3, 240–244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7290>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Gehl, J. (2011). *Life Between Buildings* (J. Koch, Trans.). Island Press.
- Hartanto, P. (2023, February 7). Dilengkapi Fasum Keren, Ini Wujud 136 Rumah di Semanggi Kampung Harmoni Solo. *Foto.Espos.Id*.
- Hirschi, T., & Schreck, C. J. (2020). *SOCIAL CONTROL THEORY.* <https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/337873997>
- Indahsari, D. P. (2021). *Analisis Persebaran Pemukiman Kumuh Di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Joni, R. P. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru).*
- Kaiser, Z. R. M. A., Sakil, A. H., Baikady, R., Deb, A., & Hossain, M. T. (2025). Building resilience in urban slums: exploring urban poverty and

- policy responses amid crises. *Discover Global Society*, 3(1).
<https://doi.org/10.1007/s44282-025-00142-3>
- KOTAKU. (2020). *Paparan Siteplan Semanggi Rw 2, Rw 3, Rw 4, Rw 5 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Surakarta*.
- Kurniatio, B. T. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 55–85.
- Kurniawan, W. (2015). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *EDAJ: Economics Development Analysis Journal*, 4(4), 443–451.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Kusumastuti, A., & Khiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno, Eds.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lestari, W. (2023, November 15). Mengintip Deretan Rumah Mungil Warnawarni di Kampung Harmoni Semanggi Solo. *Solotrust.Com*.
- Maunah, B. (2016). Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *CENDEKIA*, 2(2), 159–178.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mori Junior, R., Fien, J., & Horne, R. (2019). Implementing the UN SDGs in Universities: Challenges, Opportunities, and Lessons Learned. *Sustainability (United States)*, 12(2), 129–133.
<https://doi.org/10.1089/sus.2019.0004>
- Nikfarjam, M., Rabiei, M., Rahnejat, A. M., & Khoramdel, K. (2015). Development and Validation of a New Behavioral Cognitive Metacognitive Model for Explanation of SPD. *Psychology*, 06(10), 1223–1231. <https://doi.org/10.4236/psych.2015.610120>
- Nurlinda, I. (2010). Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipasif dan Penataan Ruang yang Terpadu. *Jurnal Hukum*, 18(2), 161–174.
- Nurprasetyarani, S. Z., & Suwitri, S. (2025). Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kelurahan Bandarharjo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 456–472.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.50632>
- Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2016). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Jurnal Teknik PWK*, 4, 267.
<https://doi.org/http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>
- perkim.id. (2024, April). *Menengok Keberhasilan Penataan Kumuh Semanggi: Dulu Kumuh, Sekarang Indah*. <https://perkim.id/kawasan-kumuh/menengok-keberhasilan-penataan-kumuh-semanggi-dulu-kumuh-sekarang-indah/>

- Puteri, M. C. P. K., & Arsandrie, Y. (2023). Proses Penataan Permukiman Kumuh Dengan Konsep Peremajaan Kawasan Semanggi. *SIAR IV: Seminar Ilmiah Arsitektur*, 718–723. <https://doi.org/http://siar.ums.ac.id/>
- Ruli, A., & Fadjarani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *JURNAL GEOGRAFI Media Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian*, 15(1), 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jg.v15i1.11888>
- Sahara, H., Subowo, A., & Herawati, A. R. (2023). Peran Stakeholders Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Dadapsari Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.40604>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Tampi, A. G. Ch., Kawung, E. J. R., & Tumiwa, J. W. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu. *e-journal "Acta Diurna,"* 5(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11717>
- Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. . (2020). *Economic development* (30th ed.). Pearson.
- Triyanti, R., & Susilowati, I. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan*, 9, 23–35.
- United Nations Human Settlements Programme. (2003). *The Challenge Of Slums*.
- Wati, S. S., Agustina, F., & Evahelda, E. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Petani Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Bangka. *Journal of Integrated Agribusiness*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.33019/jia.v2i1.1121>
- Wibawa, W., & Alwin, A. (2019). Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Penerapan Konsep Ecovillage. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.29405/jgel.v3i1.2992>
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/UB.JIAP.2016.002.01.1>
- Yessi, L. H., Lumintang, J., & Paat, C. J. (2020). Kajian Sosiologi Tentang Tingkat Kesadaran Pendidikan Pada Masyarakat Desa Labuan Kapelak Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Holistik*, 13(2).

- Yulianti, B. P., Baiquni, M., Ritohardoyo, S., Yunus, H. S., & Setiawan, B. (2015). Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung di Kota Yogyakarta). *Majalah Geografi Indonesi*, 29(1), 7–18.
- Yuniar, A. Z., Kristanto, G. A., Dahlan, A. V., & Kemala, D. (2021). Identifying the sustainability level of urban slums in the Greater Jakarta, Indonesia using a composite index. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 824(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/824/1/012093>
- Yurmansah, & Mussadun. (2016). Evaluasi Proses Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 Desa Kurau Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12 (1), 98.
- Zubaidah, S., & Kurniawan, I. A. (2022). Pertumbuhan Perkampungan Kumuh Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(2), 74–85. <https://doi.org/http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>